



LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

**TAHUN 2025
(UNAUDITED)**



www.pn-pontianak.go.id



0812 5775 8489 (INDI Whatsapp Bot)

KATA PENGANTAR

LAPORAN KUASA PENGGUNA BARANG TAHUN 2025
(UNAUDITED)



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan negara tidak hanya terbatas pada anggaran, tetapi juga mencakup aset-aset yang dimiliki negara.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah. BMN merupakan bagian penting dari kekayaan negara yang harus dikelola secara efektif dan efisien untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas pengelolaan BMN memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pertanggungjawaban atas keuangan negara. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan BMN merupakan salah satu unsur penting dalam keuangan negara, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus dilakukan secara terintegrasi dan transparan.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN serta pengelolaan BMN, Pengadilan Negeri Pontianak sebagai salah satu Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) di bawah Mahkamah Agung berkewajiban menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), yaitu Badan Peradilan Umum untuk DIPA 03. LBKP Pengadilan Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan Barang Milik Negara untuk periode tahunan.

Proses penyusunan LBKP Pengadilan Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik



Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dan PMK Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara.

Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan komitmennya menyajikan informasi yang relevan dan andal dalam mendukung penyusunan laporan ini.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan LBKP Tahunan Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*), kami berharap laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperoleh gambaran menyeluruh terkait pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Negeri Pontianak. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengambil keputusan di jajaran manajemen Mahkamah Agung sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait dengan pengelolaan BMN.

Pontianak, 27 Februari 2026

Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak

Selaku Kuasa Pengguna Barang

Yuniar Nelly

DAFTAR ISI

LAPORAN KUASA PENGGUNA BARANG TAHUN 2025
(UNAUDITED)



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK



DAFTAR ISI

DATA UTAMA

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca 31 Desember 2025
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)
4. Laporan Barang Persediaan
5. Laporan Barang Intrakomptabel
6. Laporan Barang Ekstrakomptabel
7. Laporan Barang Gabungan
8. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan
9. Laporan Aset Tak Berwujud
10. Laporan Barang Bersejarah
11. Laporan Barang Rusak Berat
12. Laporan Barang Hilang
13. Laporan Barang BPYBDS
14. Laporan Barang Hibah DK/TP
15. Laporan Penyusutan Intrakomptabel
16. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel
17. Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud
18. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN)
19. Laporan PNBPN (yang bersumber dari Pengelolaan BMN)
20. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara
21. Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
22. Laporan BMN Berupa Rumah Negara



DATA TAMBAHAN

1. Neraca Percobaan Berbasis Akrual dan Laporan Neraca Tingkat Satuan Kerja
(2 Dokumen Cetak)
2. Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar dan Penjelasan Selisihnya
3. Data/Laporan Aset Sengketa (Jika Tidak Ada Dibuat NIHIL)
4. Rekapitulasi dan Rincian Transaksi Hibah Masuk dan Hibah Keluar BMN
Berupa Aset Tetap dan Persediaan
5. Gambaran Umum Terkait Pengelolaan BMN

DAFTAR LAMPIRAN

LAPORAN KUASA PENGGUNA BARANG TAHUN 2025
(UNAUDITED)



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK



DAFTAR LAMPIRAN

1. Penjelasan BMN: Ketidaksesuaian Akun vs Kode Persediaan (jika ada)
2. Penjelasan BMN: Ketidaksesuaian Akun vs Kode BMN (jika ada)
3. Penjelasan BMN: Jalan dan Jembatan (jika ada)
4. Penjelasan BMN: Irigasi (jika ada)
5. Penjelasan BMN: Jaringan (jika ada)
6. Penjelasan BMN: Aset Tetap Renovasi (jika ada)
7. Penjelasan BMN: Aset Tak Berwujud Lainnya (jika ada)
8. Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Persediaan (jika ada)
9. Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (jika ada)
10. Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya Non Revaluasi (jika ada)
11. Penjelasan BMN: Koreksi atas Reklas Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya (jika ada)
12. Penjelasan BMN: Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan (jika ada)
13. Penjelasan BMN: Beban Penyesuaian Nilai Persediaan (jika ada)
14. Penjelasan BMN: Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin (jika ada)
15. Penjelasan BMN: Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan (jika ada)
16. Penjelasan BMN: Beban Pelepasan Aset (jika ada)
17. Penjelasan BMN: Beban Persediaan Rusak/Usang (jika ada)

OVERVIEW
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
TAHUN 2025 (UNAUDITED)



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK



OVERVIEW LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK TAHUN 2025 (UNAUDITED)

Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 *Unaudited* merupakan laporan tahunan yang disusun oleh Pengadilan Negeri Pontianak selaku Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN di awal dan akhir periode Tahun Anggaran 2025 serta mutasi selama periode tersebut. LBP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Pengadilan Negeri Pontianak selama Tahun Anggaran 2025.

Tujuan utama penyusunan LBKP Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) ini adalah untuk memberikan gambaran awal dan komprehensif mengenai posisi awal dan akhir BMN yang dikuasai dan dikelola oleh Pengadilan Negeri Pontianak beserta mutasi tambah kurangnya. Informasi yang terkandung dalam LBP *Unaudited* ini menjadi dasar bagi penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) yang merupakan bagian integral dari Laporan Keuangan (LK) Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*).

Penyusunan LBKP (*Unaudited*) ini telah mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang rekonsiliasi dan pelaporan BMN serta mengikuti ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Selain itu, LBP (*Unaudited*) ini juga telah memperhatikan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan melalui surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor S-186/KN/KN.2/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2025, dan Nomor S-3/KN/KN.2/2025 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan Laporan Barang Pengguna pada Kementerian/Lembaga Tahun 2025. Dalam penyusunannya, LBP (*Unaudited*) ini telah menerapkan penggunaan SAKTI (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi) dan MonSAKTI (Monitoring SAKTI) milik Kementerian Keuangan serta Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) untuk memastikan konsistensi dan integritas data yang disajikan dalam laporan.

Laporan ini memuat berbagai informasi penting terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN, yang terdiri dari:

1. LBMN Berdasarkan Perkiraan Neraca: Bagian ini menyajikan informasi aset



BMN secara rinci, meliputi Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Irigasi, Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, serta Aset Lainnya (termasuk Aset Tak Berwujud dan Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah). Selain itu, laporan ini juga merinci Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Akumulasi Aset Tetap Lainnya, Amortisasi Aset Tak Berwujud, dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (khususnya untuk aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah);

2. Nilai Neraca per 31 Desember 2025 adalah Rp 71.329.650,- (*tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah*) yang berasal dari nilai saldo awal 1 Januari 2025 sebesar Rp 135.928.046,- (*seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat puluh enam rupiah*) dan mutasi tambah kurang sebesar Rp 64.598.396,- (*enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah*);
3. Mutasi tambah aset terjadi karena: (1) realisasi belanja modal, terdiri atas pembelian, renovasi, dan pembangunan bangunan gedung baru; (2) hibah masuk BMN; (3) Transfer Masuk BMN; (4) Koreksi Nilai Bertambah (5) Perolehan Lainnya dan lain sebagainya. Total mutasi tambah aset adalah sebesar nihil;
4. Mutasi kurang aset terjadi karena: (1) pemindahtanganan BMN (jika ada penghapusan melalui penjualan); (2) hibah keluar BMN; (3) transfer keluar; (4) pemusnahan BMN; (5) Koreksi Nilai Berkurang (6) penghapusan BMN dan lain sebagainya. Total mutasi kurang aset adalah sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*);
5. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara: bagian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pengguna barang mengenai hal-hal yang termuat dalam Laporan Barang Pengguna. Catatan ini mencakup uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos Laporan Barang Pengguna, serta daftar rinci atau uraian mengenai mutasi aset yang disajikan dalam Neraca dan informasi penting lainnya; dan
6. Gambaran Umum Pengelolaan BMN: bagian ini memuat data Penetapan Status Penggunaan BMN (sudah ditetapkan status penggunaan dan belum ditetapkan status penggunaan); pengelolaan BMN (Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan): 1) dalam proses permohonan ke Pengelola; 2) dalam proses Pengelola Barang; 3) selesai di Pengelola Barang baik dikembalikan, ditolak dan disetujui; 4) dalam proses tindak lanjut Pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang; 5) telah diterbitkan Keputusan dari Pengelola



Barang; 6) tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang; dan 7) selesai serah terima.

LBKP (*Unaudited*) ini merupakan landasan penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 yang pada akhirnya akan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Tahun 2025 (*Unaudited*). Penyusunan LBKP (*Unaudited*) yang berkualitas menjadi langkah awal yang esensial dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Terakhir, penting untuk dicatat bahwa penyusunan LBKP (*Unaudited*) ini tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan menyusun LBKP (*Unaudited*) secara tepat waktu dan akurat, Pengadilan Negeri Pontianak telah berkomitmen dalam mengelola BMN secara bertanggung jawab dan transparan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA

TAHUN 2025 (UNAUDITED)



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK



CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

I. PENDAHULUAN

Sejak dimulainya era reformasi keuangan pada tahun 2003, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mendukung tujuan ini, Pemerintah telah menerbitkan paket peraturan perundang-undangan yang komprehensif, dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut, khususnya dalam mengatur pengelolaan BMN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur secara menyeluruh seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Cakupan siklus pengelolaan BMN yang luas ini merupakan penjabaran lebih rinci dari siklus logistik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perluasan cakupan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan negara secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pengelolaan BMN dapat berjalan dengan lebih tertib, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang optimal.

Dalam rangka mengimplementasikan regulasi tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai salah satu Kuasa Pengguna BMN di bawah Mahkamah Agung, diwajibkan untuk menyusun LBKP secara berkala, baik LBKP Semesteran maupun LBKP Tahunan. Dengan pelaporan yang tertib, diharapkan pengelolaan BMN di Pengadilan Negeri Pontianak dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.

A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah;



- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- 22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
- 23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- 24) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
- 25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 26) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 27) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 28) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 29) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik



Negara;

- 30) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 31) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 339/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 32) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 33) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2014;
- 34) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
- 35) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan.

B. Entitas Pelaporan

Pengadilan Negeri Pontianak selaku salah satu satuan kerja/unit Eselon I di bawah Mahkamah Agung merupakan entitas pelaporan Kuasa Pengguna Barang/Pembantu Pengguna Barang Eselon I.

C. Periode Pelaporan

Periode pelaporan yang disajikan dalam Catatan atas Laporan BMN (CalBMN) ini adalah untuk periode tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.



II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Hal ini mencakup penatausahaan oleh Kuasa Pengguna Barang/ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

LBKP sebagai output utama penatausahaan BMN untuk UAKPB, menjadi sarana pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang dalam periode tertentu. LBKP juga dapat digunakan sebagai sumber informasi prediktif dalam pengambilan keputusan terkait BMN di masa depan. Laporan ini juga menjadi bahan penyusunan neraca BMN yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan satuan kerja.

Agar bermanfaat, informasi dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan yang baik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Relevansi tercapai jika informasi dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, memiliki nilai umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Keandalan terpenuhi jika informasi bebas dari kekeliruan, disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi, serta tidak berpihak pada pihak tertentu. Daya banding tercapai jika informasi dapat diperbandingkan baik secara internal (antar periode) maupun eksternal (dengan pengguna lain). Kemudahan pemahaman dicapai jika informasi disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna laporan.

Untuk mencapai kualitas LBKP yang memenuhi persyaratan tersebut, pencatatan dan pelaporan BMN harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan prinsip yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, perlu dipastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMN sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kebijakan akuntansi dalam penatausahaan BMN yang diterapkan.

1. Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi BMN
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)
3. Kapitalisasi BMN
4. Penyusutan BMN
5. Rekonsiliasi BMN
6. Pelaporan BMN



A. Kebijakan Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodifikasi

Penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran krusial dalam mempermudah proses akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Dengan menerapkan sistem kodifikasi BMN yang seragam dan menyeluruh di setiap Kuasa Pengguna dan Pengguna BMN, informasi yang tercantum dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) dapat lebih mudah dibandingkan dan dipahami. Hal ini dapat terwujud berkat penerapan kaidah pengelompokan yang konsisten antarperiode pelaporan dan antarentitas pelaporan.

Penatausahaan BMN pada LBKP ini telah dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara**. Kodifikasi ini disesuaikan dengan penggolongan masing-masing BMN dan diselaraskan dengan Bagan Akun Standar. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penyajian BMN pada Neraca BMN dan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada Tahun 2025, Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi telah berhasil mengusulkan spesifikasi Barang Milik Negara (BMN) khusus untuk tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan. Usulan tersebut kemudian ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi BMN.

Keputusan Menteri Keuangan tersebut mengakibatkan perubahan masif terhadap kodifikasi BMN seluruh tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan di Indonesia. Perubahan kodifikasi BMN telah dilakukan pada 915 satuan kerja, dengan rincian Tanah Bangunan Kantor Pengadilan sebanyak 1.093 NUP dan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan sebanyak 1.074 NUP. Implementasi perubahan kodifikasi BMN ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Dengan adanya sistem kodifikasi yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, satuan kerja dapat lebih mudah mengelola BMN, baik dari aspek perencanaan (RKBMN), pemeliharaan, maupun pemanfaatan.



B. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar

Salah satu tujuan utama penyusunan LBKP ini adalah menyediakan data yang akurat untuk Neraca BMN Pengadilan Negeri Pontianak. Oleh karena itu, pelaporan LBKP ini telah disusun sesuai dengan standar neraca, dengan menyesuaikan penggolongan dan kodifikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 dan seluruh aturan perubahan dan penambahannya, ke dalam penggolongan yang selaras dengan akun neraca, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar**.

Penyesuaian ini menghasilkan penyajian BMN dalam tiga pos neraca, yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Persediaan merupakan aset lancar yang mencakup barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah serta barang yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan dalam pelayanan publik.

Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi, seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Sementara itu, Aset Lainnya mencakup aset pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, atau dana cadangan. Aset ini terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk hak kekayaan intelektual. Adapun Aset Lain-Lain meliputi aset yang tidak tergolong dalam Aset Tak Berwujud, seperti aset tetap yang sudah tidak digunakan.

Dalam Laporan BMN, Aset Lainnya hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi termasuk dalam kelompok tersebut. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan, yang mencakup BMN dan non-BMN, seperti piutang antar Kementerian/Lembaga, aset dengan penggunaan terbatas, dan sebagainya.

Dengan penyajian yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan keuangan negara, LBKP ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan, andal, dan akuntabel. Hal ini akan mendukung proses pelaporan keuangan serta menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN di Mahkamah Agung.



C. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Kapitalisasi BMN dilaksanakan berdasarkan Lampiran VII **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)**, BMN diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. BMN intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan dicatat dalam Neraca Pemerintah Pusat. Sementara itu, BMN ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan umumnya hanya dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BMN dianggap memenuhi syarat kapitalisasi jika nilainya melebihi batas minimum yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Untuk gedung dan bangunan, nilai minimumnya adalah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) atau lebih.
2. Untuk peralatan, mesin, dan alat olahraga, nilai minimumnya adalah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau lebih.
3. Untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak seni budaya, nilai minimumnya adalah Rp1,00 (*satu rupiah*) atau lebih.

Kebijakan kapitalisasi BMN ini memiliki peran penting dalam penyajian BMN dalam Neraca Pemerintah di semua tingkatan pelaporan, mulai dari Satuan Kerja, Kementerian/Lembaga, hingga Pemerintah Pusat. Kapitalisasi menentukan apakah suatu BMN akan dicatat sebagai aset dalam Neraca atau hanya dilaporkan dalam CaLK.

D. Kebijakan Penyusutan BMN

Penyusutan Aset Tetap BMN dijalankan menggunakan metode garis lurus, yang mengalokasikan nilai susut aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Pengadilan Negeri Pontianak, dalam LBKP Tahun 2025 (*Unaudited*) ini telah menerapkan penyusutan aset tetap BMN sesuai **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat**.

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai yang mencerminkan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap seiring waktu. Beberapa ketentuan dasar penerapannya adalah:



1. Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.
2. Nilai susut pertama kali dihitung dari nilai yang tercatat dalam pembukuan (nilai buku) per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh hingga tanggal tersebut. Untuk aset tetap yang diperoleh setelahnya, nilai susut dihitung dari nilai perolehan atau nilai wajar apabila nilai perolehan tidak diketahui.
3. Penyusutan dihitung dan dicatat setiap akhir semester tanpa mempertimbangkan nilai residu.
4. Metode garis lurus digunakan dengan mengalokasikan nilai susut secara merata setiap semester selama masa manfaat aset tetap tersebut.
5. Masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 413/MK/KN/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Sementara itu, masa manfaat aset tak berwujud dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 414/MK/KN/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

E. Kebijakan Rekonsiliasi Nilai BMN

Rekonsiliasi bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi atau kejadian yang memengaruhi nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dengan benar dalam laporan BMN. Dengan demikian, laporan BMN akan memiliki kualifikasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan secara periodik pada setiap tingkat pelaporan. Proses ini dimulai dari rekonsiliasi internal di tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB), kemudian rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, dan terakhir rekonsiliasi internal oleh Bendahara Umum Negara. Kebijakan Rekonsiliasi BMN dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.**



Mahkamah Agung telah berupaya untuk merealisasikan kebijakan ini melalui fitur Transaksi BMN dalam Modul Penatausahaan BMN yang ada pada aplikasi E-SADEWA (*Electronic State-Asset Development and Enhancement Work Application*). Dengan adanya fitur ini, rekonsiliasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satker, Korwil, hingga Mahkamah Agung untuk memastikan setiap transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

F. Kebijakan Pelaporan BMN

Seluruh aktivitas dalam siklus pengelolaan BMN akan tercermin pada aktivitas penatausahaan BMN. Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Seluruh aktivitas pengelolaan BMN akan tercermin dalam kegiatan pelaporan. Output kegiatan pelaporan BMN adalah Laporan Barang Milik Negara (LBMN). Untuk pelaporan BMN pada tingkat Kuasa Pengguna Barang dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang (LBKP). Untuk penyusunan LBKP satuan kerja di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 84/BUA.4/PL1.2.7/II/2026 Di dalamnya ketentuan penyusunan LBKP juga pada prinsipnya mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan melalui **Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atas nama Direktur Kekayaan Negara Nomor S-186/KN/KN.2/2025 tanggal 23 Desember 2025 perihal Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Tingkat K/L Tahun 2025 dan Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atas nama Direktur Kekayaan Negara Nomor S-3/KN/KN.2/2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan Laporan Barang Pengguna pada K/L Tahun 2025 (Unaudited)**.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang dilakukan penatausahaan dan dikelola oleh Pengadilan Negeri Pontianak. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) ini adalah sebesar nihil yang terjadi selama Tahun Anggaran 2025.

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan



penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang bersumber dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi nonkeuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN pada periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca per 31 Desember 2025
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal) per 1 Januari 2025
4. Laporan Barang Persediaan;
5. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
6. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
7. Laporan Aset Tak Berwujud;
8. Laporan Barang Bersejarah;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan BPYBDS;
12. Laporan Barang Hibah DK/TP
13. Laporan Penyusutan;
14. Laporan Amortisasi BMN;
15. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CalBMN);
16. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN);
17. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian BMN;
18. Rekapitulasi KDP Beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
19. Laporan BMN berupa Rumah Negara.



IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

A. Saldo Awal

Nilai BMN per 1 Januari 2025 menurut Pengadilan Negeri Pontianak adalah sebesar Rp 135.928.046,- (*seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat puluh enam rupiah*).

B. Ringkasan Mutasi BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (Unaudited)

Mutasi Barang Milik Negara Periode Tahunan Tahun 2025 (*Unaudited*) yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 71.329.650 (*tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian		Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Tambah	Kurang	
117111	Barang Konsumsi	135.928.046	222.047.560	286.645.956	71.329.650
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0	0	0



117131	Bahan Baku	0	0	0	0
117141	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0	0	0	0
Jumlah		135.928.046	222.047.560	286.645.956	71.329.650

Tabel 1. Rincian Mutasi Barang Persediaan

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*) yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp 0,- (*nol rupiah*) dan kondisi usang senilai Rp 0,- (*nol rupiah*).

2. Tanah

Tidak terdapat BMN berupa Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025.

3. Peralatan dan Mesin

Tidak terdapat BMN berupa Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Tidak terdapat Akumulasi Penyusutan BMN berupa Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal BMN berupa Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025.



4. Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat BMN berupa Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025.

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat Akumulasi Penyusutan BMN berupa Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025.

5. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Tidak terdapat BMN berupa Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025.

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Tidak terdapat Akumulasi Penyusutan BMN berupa Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025.

6. Aset Tetap Lainnya

Tidak terdapat BMN berupa Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Tidak terdapat Akumulasi Penyusutan BMN berupa Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025.

7. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tidak terdapat BMN berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025.



8. Aset Lainnya

Tidak terdapat BMN berupa Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025.

Rincian Mutasi Aset Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Tidak terdapat BMN berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025.

b. Aset Tak Berwujud

Tidak terdapat BMN berupa Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025.

c. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Tidak terdapat BMN berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025.

9. Aset Bersejarah

Tidak terdapat BMN berupa Aset Bersejarah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025.

V. BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2025

A. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 71.329.650,- (*tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah*), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan pos-pos perkiraan neraca, yaitu Persediaan.



Penyajian nilai BMN dalam pos-pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	71.329.650	100%	0	0%	71.329.650	100%
Sub Jumlah (1)		71.329.650	100%	0	0%	71.329.650	100%
II	Aset Tetap						
1	Tanah	0	0%	0	0%	0	0%
2	Peralatan dan Mesin	0	0%	0	0%	0	0%
3	Gedung dan Bangunan	0	0%	0	0%	0	0%
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	0	0%	0	0%	0	0%
5	Aset Tetap Lainnya	0	0%	0	0%	0	0%
6	KDP	0	0%	0	0%	0	0%
Sub Jumlah (2)		0	0%	0	0%	0	0%
III	Aset Lainnya				0%		
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0%	0	0%	0	0%
2	Aset Tak Berwujud	0	0%	0	0%	0	0%
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	0	0%	0	0%	0	0%
Sub Jumlah (3)		0	0%	0	0%	0	0%
Total		71.329.650	100%	0	0%	71.329.650	100%

Tabel 40. Nilai Barang Milik Negara Per Akun Neraca

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
NIHIL							

Tabel 41. Nilai Akumulasi Penyusutan BMN Per Akun Neraca

B. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dengan Laporan Keuangan

Perbandingan nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 per akun neraca adalah sebagai berikut:



No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
I	Aset Lancar	71.329.650	71.329.650	0
1	Persediaan	71.329.650	71.329.650	0
II	Aset Tetap	0	0	0
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0	0	0
III	Aset Lainnya	0	0	0
1	Aset Tak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-Lain *)	0	0	0
3	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0
Total Nilai BMN (Intrakomptabel/Neraca)		71.329.650	71.329.650	0

Tabel 42. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.



VI. INFORMASI BMN LAINNYA

A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir (*Unaudited*), dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Per 31 Desember 2023	73.583.375	17.929.150	24%
2	Per 30 Juni 2024	129.097.371	55.513.996	43%
3	Per 31 Desember 2024	135.928.046	6.830.675	5%
4	Per 30 Juni 2025	99.312.900	36.615.146	37%
5	Per 31 Desember 2025	71.329.650	27.983.250	39%

Tabel 43. Perkembangan Nilai BMN Pengadilan Negeri Pontianak per Periode Laporan *Unaudited*

B. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		KUANTITAS	NILAI (Rp)	KUANTITAS	NILAI (Rp)
NIHIL					

Tabel 44. Penetapan Status Penggunaan BMN pada Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025

b. Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN pada Pengadilan Negeri Pontianak selama periode Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:



No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah-tanganan	Pemusnahan	Penghapusan	Alih Fungsi	Alih Status	Jumlah
NIHIL									

Tabel 45. Pengelolaan BMN pada Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025

c. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	-
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

Tabel 46. Pengelolaan BMN Idle pada Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025

d. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

1. Daftar Barang Rusak Berat

Tidak ada Daftar barang dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang.

2. Daftar Barang Hilang

Tidak ada Daftar barang hilang dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang.



e. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:

1. BMN dalam sengketa/perkara/bermasalah

Pengadilan Negeri Pontianak tidak ada BMN dalam sengketa/perkara/bermasalah.

2. Tanah Belum Bersertipikat

Pengadilan Negeri Pontianak memiliki tanah yang sudah bersertifikat. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I yang berada di Jl. Karel Satsuit Tubun bersertifikat atas nama Pemprov Kalimantan Barat dan masih dalam proses perubahan nama di BPN.

f. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Tidak terdapat langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Laporan Barang Pengguna Satker Pengadilan Negeri Pontianak per 31 Desember 2025.

g. Pengungkapan Penting Lainnya

Tidak terdapat pengungkapan penting lainnya yang perlu dilakukan pada Laporan Barang Pengguna Satker Pengadilan Negeri Pontianak per 31 Desember 2025.

h. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 203/BUA.4/PL1.2.5/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal Perubahan Kodefikasi BMN, Pengadilan Negeri Pontianak telah melaksanakan perubahan tersebut pada tanah dan gedung kantor pengadilan dengan rincian sebagai berikut:



No	Nama Barang (Awal)	NUP	Nama Barang (Akhir)	NUP
NIHIL				

Tabel 47. Perubahan Kodifikasi Tanah dan Gedung Kantor
Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Pontianak

C. Tindak Lanjut Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.a/LHP/XIV/05/2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 618/BUA.4/PL1.2/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Petunjuk Teknis Tinjau Temuan BPK atas LKKL Tahun 2024 terkait Aset Tetap dan Persediaan, Tidak Terdapat temuan BPK pada Pengadilan Negeri Pontianak.

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

TAHUN 2025 (UNAUDITED)



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK



GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya masih mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melalui sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Beberapa kebijakan terkait pengelolaan BMN secara internal juga telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, antara lain: Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penjualan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 275/SEK/PL1.2/VII/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Sementara itu, pendelegasian kewenangan Mahkamah Agung juga telah diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1085/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Pengguna Barang Kepada Sekretaris Unit Eselon I, Kepala Biro Umum, Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Banding, dan Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Pertama untuk Menandatangani Surat, Persetujuan, dan/atau Keputusan atas Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Pengadilan Negeri Pontianak telah melaksanakan pengelolaan BMN berdasarkan ketentuan dan aturan tersebut di atas. Berikut ini adalah gambaran pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pontianak selama tahun 2025.

a. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara

Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pontianak telah mengajukan RKBMN untuk Tahun 2027 dengan rincian sebagai berikut:



No	Jenis RKBMN	Nama Barang	Hasil Telaah
NIHIL			

Dari tabel di atas terdapat total usulan RKBMN yang berdasarkan hasil telaah disetujui sebanyak Nihil.

Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pontianak juga telah mengajukan usulan RP3BMN untuk Tahun 2027 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis RP3BMN	Jumlah Usulan	Hasil Telaah
NIHIL			

b. Penetapan Status Penggunaan BMN

BMN yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Pontianak yang telah dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) per 31 Desember 2025 adalah Nihil.

Jenis BMN	Belum Ditetapkan Status Penggunaan		Telah Ditetapkan Status Penggunaan		Jumlah BMN	
	Kuantitas (A)	Nilai (Rp) (C)	Kuantitas (B)	Nilai (Rp) (D)	Kuantitas (A+B)	Nilai (C+D)
NIHIL						

c. Pengelolaan BMN

Pengadilan Negeri Pontianak telah melakukan permohonan terkait pengelolaan BMN berdasarkan data di SIMAN pada Menu Pengelolaan – Monitoring Pengelolaan ke Pengelola Barang (melalui KPKNL setempat) sampai dengan 31 Desember 2025 rincian sebagai berikut:

1. Dalam Proses Permohonan ke Pengelola

Pengadilan Negeri Pontianak tidak memiliki permohonan yang masih dalam proses ke Pengelola Barang.

2. Dalam Proses Tindak Lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pengadilan Negeri Pontianak tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang masih dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna



Barang.

3. Telah Diterbitkan Keputusan Dari Pengelola Barang

Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, Pengadilan Negeri Pontianak telah menerima Keputusan dari Pengelola Barang dengan nilai Nihil.

No	No. Tiket	No. Keputusan	Jenis Barang	Nilai Permohonan (Rp)
NIHIL				

4. Selesai Serah Terima

Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, Pengadilan Negeri Pontianak telah menerima Keputusan dari Pengguna Barang dengan nilai sebesar Nihil.

No	No. Tiket	Jenis Permohonan (PSP, Penjualan, dll)	Nilai Permohonan (Rp)
Nihil			

LAMPIRAN PENJELASAN BMN

TAHUN 2025 (UNAUDITED)



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
PENJELASAN TELAAH DATA ATAS PERMASALAHAN TO DO LIST MONSAKTI
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 (Unaudited)

No	Kode Satker	Nama Satker	Tahun	Eselon	Wilayah	Kode	Uraian	Nilai (RP)	Penjelasan
NIHIL									

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL

ANTARA UAKPA DAN UAKPB
PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
PER 31 DESEMBER 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**
Jln. Sultan Abdurrahman No. 89 Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak 78116
Telp. (0561) 734100 www.pn-pontianak.go.id, pengadilannegeriptk@gmail.com

**BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA
Pada Pengadilan Negeri Pontianak
Periode Unaudited - Tahun Anggaran 2025
Nomor : BA/06/099239/II/2026**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : Rizka Kamelya, S.T.
NIP : 19920521 202506 2 006
Jabatan : Operator Aset dan Persediaan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

II Nama : Lies Ertanti, S.E.
NIP : 198401242011012009
Jabatan : Operator GLP

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna (LBP) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/ Barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKK/L) untuk periode Unaudited - Tahun Anggaran 2025, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Unaudited Tahun Anggaran 2025		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	POSISI BMN DI NERACA (A+B+C)	135.928.046	(64.598.396)	71.329.650
A	ASET LANCAR	135.928.046	(64.598.396)	71.329.650
1	Persediaan	135.928.046	(64.598.396)	71.329.650
B	ASET TETAP	0	0	0
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap dalam Renovasi	0	0	0
6	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
8	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0
3	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0
II	BMN NON NERACA	0	0	0
1	Ekstrakomptabel	0	0	0
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	0	0	0
III	TOTAL GABUNGAN (I + II)	135.928.046	(64.598.396)	71.329.650

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Periode Unaudited Tahun Anggaran 2025, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Operator Aset dan Persediaan

Rizka Kamelya, S.T.
NIP. 19920521 202506 2 006

Operator GLP

Lies Ertanti, S.E.
NIP. 198401242011012009



Mengetahui
Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak

Yuniar Nelly, S.T., M.M.
NIP. 19770624 200604 2001

LAPORAN POSISI BMN DI NERACA

POSISI PER 31 DESEMBER 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099239 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl.Data : 10/02/26 6:35 AM
Tgl.Cetak : 10/02/26 1:53 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	71,329,650
J U M L A H		71,329,650

Pontianak, 10 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak



YUNIAR NELLY, S.T., M.M.
197706242006042001

LAPORAN POSISI BMN DI NERACA (SALDO AWAL)

POSISI PER 01 JANUARI 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2025(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2025**

UAPB : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
UAKPB : 099239 **PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**

Tanggal : 26/02/26 8:22 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	135,928,046
J U M L A H		135,928,046

LAPORAN PERSEDIAAN
POSISI PER 31 DESEMBER 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

UAPB : MAHKAMAH AGUNG
UAPPB-E1 : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
UAPPB-W : PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

KODE UAKPB : 005.03.1300.099239

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2025
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	7,234,900
000001	Pulpen	0
000002	Pensil 2B	84,900
000003	Gunting (Besar)	144,000
000004	Spidol Permanen	204,000
000005	Stabilo	45,000
000006	Spidol Kecil	0
000008	Spidol Boardmarker	475,000
000009	Balliner	5,290,000
000010	Pulpen Standart AE-7	0
000011	Spidol White Board	0
000012	Pulpen Snowman V-5	620,000
000013	Pulpen Ball Liner	0
000014	Pulpen Joyko Spirit	294,000
000015	pulpen kenko	0
000023	Spidol Permanent	0
000024	Spidol Warna Warni	0
000025	Pulpen tizo	78,000
000026	Pulpen Kenko Biru	0
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	432,000
000001	Tinta Stempel	324,000
000003	Refil Pulpen	0
000004	Tinta Stempel Laser	108,000
1010301003	Penjepit Kertas	1,613,500
000001	Binder No. 260	397,500
000002	Binder No. 111	312,000
000003	Paper Clip No. 5	117,000
000004	Paper Clip No. 3	6,000
000005	Binder Clip No. 200	266,000
000006	Binder Clip No. 107	262,500
000007	Binder Clip No. 155	252,500
000008	Binder Clip No. 105	0
000010	Binder Clips No. 280	0
000012	Paper Clip Warna	0
000014	deli color binder clip	0
000015	kenko binder no.2	0
1010301004	Penghapus/Korektor	260,800
000001	Tipe Eks	224,000
000002	Penghapus Pensil	36,800
000003	Penghapus WB	0
000004	TIPE EK KERTAS	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

KODE UAKPB : 005.03.1300.099239

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2025
1010301005	Buku Tulis	1,539,000
000001	Buku Reg. Folio isi 100	210,000
000002	Buku Reg. Folio isi 200	735,000
000003	Buku Ekspedisi	540,000
000004	Agenda Sidang Hakim	0
000049	Buku Tulis Batik A5	54,000
000052	Buku Double Folio	0
1010301006	Ordner Dan Map	21,493,000
000001	Odner Besar	0
000002	Map (snailhacter) Plastik	228,000
000004	Map (Jepit) Plastik	154,000
000005	Odner	0
000006	File Box	8,536,000
000009	MAP Perkara Pidana	10,950,000
000010	Ordner Gobi 8401	0
000012	Map Buffalo Hijau	0
000015	Map Biola	1,625,000
000017	Map Kancing	0
000018	Map Folder	0
000019	Map Snailhacter Plastik Transparan	0
000020	Sheet Protector(Plastik File)	0
000021	Map Plastik Jepit	0
1010301007	Penggaris	292,500
000001	Penggaris (besi) 30 cm	292,500
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	498,500
000001	Cutter	192,500
000002	Isi Cutter	306,000
1010301010	Alat Perekat	2,422,000
000001	Lakban Bening	456,000
000002	Lakban Hitam 2	467,500
000003	Double Tape 1	22,000
000004	Lem Fox Putih	108,000
000005	Lem Stick	90,000
000008	Isolasi 1	0
000011	Double Tape 3M (1)	232,000
000012	Double Tape 2	462,000
000014	Double Tape 3M 24mm	0
000016	solasi 2	0
000018	isolasi bening 24	426,000
000019	isolasi kertas nasway 1	158,500
000026	lem cair	0
1010301011	Stadler HD	0
000002	Mesin Staples No. 3	0
1010301012	Staples	420,000
000001	Mesin Staples No. 10	150,000

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

KODE UAKPB : 005.03.1300.099239

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2025
000003	Mesin Stapler 24/6	270,000
1010301013	Isi Staples	526,250
000001	Isi Stapler No. 10	0
000002	Isi Staples No 3	201,250
000004	Isi Staples 23/17	0
000005	Isi Staples 23/20	325,000
1010301014	Barang Cetak	0
000005	buku jurnal keuangan PHI	0
000006	Buku SKUM	0
000007	Register Induk Perkara Pidana Biasa Anak	0
000009	Buku Register Induk Gugatan PHI	0
000010	Buku Register Pendaftaran Perjanjian Bersama Mediasi PHI	0
000011	buku register keuangan phi	0
000012	Buku Agenda Sidang Hakim PN	0
000015	Buku Jurnal Keuangan Perkara PN dan PHI KI-A1/P	0
000017	Buku Register Penyitaan PN	0
000018	Buku Register Eksekusi PN	0
000019	buku register permohonan PK Perkara Pidana PN	0
000020	Buku Agenda Sidang Hakim Tipikor PN	0
000021	Buku Agenda Sidang Hakim PHI	0
000022	Buku Agenda Sidang Hakim Perikanan	0
000023	Buku Jurnal Keuangan Perkara PN dan PHI KI-A1/G	0
000024	Buku Jurnal Keuangan Perkara PN dan PHIKI-A2	0
000025	Buku Jurnal Keuangan Perkara PN dan PHI KI-A3	0
000026	Buku Jurnal Keuangan Perkara PN dan PHI KI-A4	0
000027	Buku Jurnal Keuangan Perkara PN dan PHI KI-A5	0
000028	Buku Register Induk Keuangan Perkara PN KI-A7	0
000029	Buku Register Induk Keuangan Perkara PN KI-A8	0
000030	Buku Register Induk Keuangan Perkara PN KI-A9	0
000031	Buku Register Induk Pidana Biasa	0
000032	buku register induk perkara pidana singkat	0
000033	register induk perkara pidana banding PN	0
000034	buku register induk perkara pidana Kasasi PN	0
000035	Buku Bantu Pengadilan Negeri	0
000036	Register Induk Perkara Gugatan PN	0
000037	Register Induk Perkara Permohonan PN	0
000038	Buku Register Induk Perkara Perdata Banding PN	0
000039	Buku Register Induk Perkara Perdata Kasasi PN	0
000040	Register Grasi	0
000041	Buku Register Induk Perkara Pidana Cepat	0
000042	Register Ijin Persetujuan Penggeledahan PN	0
000043	Register Ijin Persetujuan Penyitaan PN	0
000044	Register Tindak Pidana Ringan	0
000045	Register Barang Bukti	0
000046	Register Pra Peradilan	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

KODE UAKPB : 005.03.1300.099239

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2025
000047	Register Penahanan	0
000048	Buku Register Eksekusi PHI	0
000050	Buku Regiter Pendaftaran Perjanjian Bersama Konsiliasi PHI	0
000051	Buku Regiter Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit PHI	0
000052	Buku Register Penyitaan PHI	0
000053	Buku Register Pendaftaran Arbitase	0
000054	Buku Register Permohonan Kasasi PHI	0
000055	Buku Register Permohonan PK PHI	0
000056	Buku Register Permohonan Banding Tipikor	0
000057	Buku Register Permohonan Kasasi Tipikor	0
000058	Buku Register Permohonan PK Tipikor	0
000059	Buku Register Penahanan Tipikor	0
000060	Register Pengegedahan Tipikor	0
000061	Buku Register Penyitaan Tipikor	0
000062	Buku Register Barang Bukti Tipikor	0
000063	Buku Register Permohonan Grasi Tipikor	0
000064	Buku Register Induk Perkara Tipikor	0
000065	Buku Register Permohonan PK Perkara Perdata PN	0
000066	Buku Register Induk Perkara Pidana Singkat Anak	0
000067	Register Tindak Pidana Ringan Anak	0
000068	Register Permohonan Banding Anak	0
000069	Register Permohonan Kasasi Anak	0
000070	Register Penahanan Anak	0
000071	Register Permohonan PK Anak	0
000072	Register Piadana Anak Korban dan Anak Saksi	0
000073	Register Kesepakatan Diversi	0
000074	Register Permohonan Grasi Perkara Pidana Anak	0
000075	Buku Jurnal Keuangan Perkara PHI	0
000076	Buku Register Induk Perkara Perdata Gugatan	0
000077	Buku Register Induk Perkara Perdata Permohonan	0
1010301015	Seminar Kit	0
000001	Goodie Bag	0
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	1,643,200
000001	Remover	391,000
000002	Pelubang Kertas	431,000
000003	Peraut Pensil	156,000
000004	Materai 6000	0
000005	Benang Kasur	0
000006	Jarum Kasur	33,000
000007	Materai 3000	0
000008	materai 10.000	0
000009	Tip eks Cair	110,000
000010	Gunting	432,200
000011	Mika Stand A5	0
000012	Isi Guntaker 13/8	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

KODE UAKPB : 005.03.1300.099239

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2025
000013	Hardisk Eksternal	0
000014	Tipe Eks Kertas (Kering)	90,000
1010302001	Kertas HVS	0
000003	HVS A4 80gsm	0
000004	HVS F4 80gsm	0
000006	HVS A3 70 gsm	0
000007	HVS F4 75 gram	0
000008	HVS A4 75 gram	0
1010302002	Berbagai Kertas	0
000003	Kertas Kissing	0
000005	Stick Note	0
000007	Stiker Cromo	0
000009	Kertas Foto	0
000012	Memo Stick	0
000015	Pembatas Kertas	0
1010302003	Kertas Cover	70,000
000001	Kertas Cover	70,000
1010302004	Amplop	0
000001	Amplop (coklat) Uk. Kabinet	0
1010303001	Transparant Sheet	0
000001	Clear Sheet Protector Isi 100	0
1010304002	Computer File/Tempat Disket	0
000001	Plastik CD	0
1010304003	Pita Printer	0
000001	811	0
1010304004	Tinta/Toner Printer	29,026,000
000001	Tinta Canon Hitam	592,500
000002	Tinta Canon Warna	908,500
000003	Catridge Canon 810	320,000
000004	Catridge Canon 811	400,000
000005	Catridge Canon 830	990,000
000006	Catridge Canon 831	815,000
000009	Catridge Canon 741	3,140,000
000010	Catridge Canon 740	3,385,000
000011	Catridge Canon 745	2,520,000
000012	Catridge Canon 746	4,250,000
000013	Tinta Canon	1,955,000
000014	Tinta Botol Epson 664	1,350,000
000016	Tinta Epson 003 Warna	390,000
000017	Tinta Epson 003 Hitam	1,820,000
000018	Tinta Canon BK GI-790 Hitam	270,000
000019	Tinta HP GT-52 Warna Botol	1,755,000
000020	Tinta Canon BK GI-790 Warna	1,685,000
000021	Tinta HP GT-02 Hitam Botol	0
000022	Catridge HP MOH50AA	1,480,000

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

KODE UAKPB : 005.03.1300.099239

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2025
000023	Catridge HP XE75AA	1,000,000
000024	tinta canon 71	0
1010304006	USB/Flash Disk	0
000001	Flash disc 16 GB	0
000002	Flash Disc 8 GB	0
000003	Flashdisc 32GB	0
1010304009	Harddisk Internal	0
000001	Hardisk Eksternal	0
1010304010	Mouse	825,000
000001	Mouse Wireless	825,000
1010304011	CD/DVD	390,000
000001	CD R	390,000
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	0
000001	Catidge Canon 810	0
000002	Catridge Canon 740	0
000003	Catridge Canon 745	0
000004	Catridge Canon 811	0
000005	Catridge Canon 741	0
000006	Catridge Canon 746	0
000007	USB Hub	0
1010306005	Stacker	0
000002	Stick Note	0
1010306010	Batu Baterai	2,415,000
000001	Baterai AA	0
000002	Baterai Besar	0
000005	Baterai AAA	2,415,000
000006	Baterai Cas	0
1010307006	Atribut	0
000001	Palu Hakim	0
000003	Bendera Mahkamah Agung	0
1010309001	Meterai	0
000001	Materai	0
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	0
000001	Mata Bor	0
000003	Zipper Bag	0
1010311999	Bahan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	0
000001	Benang Jahit	0
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	228,000
000001	Laken Hijau	0
000003	Memo Stick	228,000
000004	Pembatas Kertas	0
Jumlah per Akun		71,329,650
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	0
000016	Kalkulator	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

KODE UAKPB : 005.03.1300.099239

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2025
Jumlah per Akun		0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	
1010501001	Pita Cukai, Materai, Leges	0
000001	Materai 10.000	0
Jumlah per Akun		0
117141	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	
1011001007	Barang Persediaan	0
000001	Jarum Jilid	0
Jumlah per Akun		0
Total Jumlah		71,329,650

Keterangan

1. Persediaan senilai 0,- dalam kondisi rusak
2. Persediaan senilai 0,- dalam kondisi usang



Disetujui tanggal : 31-12-2025
 Kuasa Pengguna Barang

YUNIAR NELLY, S.T., M.M.
 197706242006042001

Pontianak, 31-12-2025
 Petugas Pengelola Persediaan

RUSLI
 198111102025211047

LAPORAN BMN INTRAKOMPTABEL

POSISI PER 31 DESEMBER 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

Tgl Data : 10/02/26 6:35 AM

Tgl Cetak : 10/02/26 12:23 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker_poc

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099239 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Pontianak, 10 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak



YUNIAR NELLY, S.T., M.M.
197706242006042001

LAPORAN BMN EKSTRAKOMPTABEL

POSISI PER 31 DESEMBER 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099239 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 26/02/26 12:51 AM
Tgl Cetak : 26/02/26 8:23 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8

Pontianak, 26 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak



YUNIARNELLY, S.T., M.M.
197706242006042001

**LAPORAN BMN GABUNGAN
INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
POSISI PER 31 DESEMBER 2025**



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

Tgl Data : 10/02/26 6:35 AM

Tgl Cetak : 10/02/26 12:30 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker_poc

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099239 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Pontianak, 10 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPB

Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak



YUNIAR NELLY, S.T., M.M.

197706242006042001

LAPORAN BMN
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
POSISI PER 31 DESEMBER 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Pencarian Menu

- Administrasi
- Referensi
- Persediaan
- Aset Tetap**
 - RUH
 - Monitoring
- Cetak**
 - Buku/Daftar
 - Laporan**
 - Laporan Kondisi Barang
 - Laporan BMN**
 - Laporan Konsesi Jasa Mitra
- ADK
- Penutupan Periode
- Pengaturan
- Likuidasi
- Normalisasi
- Konsesi Jasa Mitra
- Akuntansi dan Pelaporan

Kode UAKPB 005031300099239000KD

Laporan Barang

Pilihan Cetak

Level Laporan SATKER

Jenis Laporan Lapo

Laporan Lapo

Sub Laporan BAR

Rincian Barang KELC

Periode Sampai Dengan 2025

Tipe File PDF Excel

Warning

📌 Laporan tidak ditemukan.

✓ OK

📄 Unduh 🚪 Keluar

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

LAPORAN BMN ASET TAK BERWUJUD

POSISI PER 31 DESEMBER 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK


**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099239 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 10/02/26 6:35 AM
Tanggal : 10/02/26 12:37 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Pontianak, 10 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak



YUNIAR NELLY, S.T., M.M.
197706242006042001

LAPORAN BMN BERSEJARAH
POSISI PER 31 DESEMBER 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Pencarian Menu

- Administrasi
- Referensi
- Persediaan
- Aset Tetap
 - RUH
 - Monitoring
 - Cetak
 - Buku/Daftar
 - Laporan
 - Laporan Kondisi Barang
 - Laporan BMN
 - Laporan Konsesi Jasa Mitra
 - ADK
 - Penutupan Periode
 - Pengaturan
 - Likuidasi
 - Normalisasi
 - Konsesi Jasa Mitra
- Akuntansi dan Pelaporan

Kode UAKPB 005031300099239000KD

Laporan Barang

Pilihan Cetak

Level Laporan SATKER

Jenis Laporan Lapd

Laporan Lapd

Sub Laporan KON

Rincian Barang KELC

Periode Sampai Dengan 2025

Tipe File PDF Excel

Warning

Laporan tidak ditemukan.

OK

Unduh

Keluar

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

**DAFTAR BMN RUSAK BERAT
YANG DIUSULKAN KE PENGELOLA
POSISI PER 31 DESEMBER 2025**



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

**DAFTAR BMN YANG DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
KODE UAKPB : 099239

TANGGAL : 26-02-2026
Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_po
HALAMAN: 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
Tidak ada data											
JUMLAH											

PONTIANAK, 26 FEBRUARI 2026
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak



YUNIAR NELLY, S.T., M.M.
NIP. 197706242006042001

DAFTAR BMN HILANG
POSISI PER 31 DESEMBER 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

**DAFTAR BMN YANG DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
KODE UAKPB : 099239

TANGGAL : 26-02-2026
Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_po
HALAMAN: 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
Tidak ada data											
JUMLAH											

PONTIANAK, 26 FEBRUARI 2026
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak



YUNIAR NELLY, S.T., M.M.
NIP. 197706242006042001

LAPORAN BARANG BPYDS
POSISI PER 31 DESEMBER 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

**DAFTAR BARANG BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
KODE UAKPB : 099239

TANGGAL : 26-02-2026
Kode LAP : daftar_bmn_bpybds_p
HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

PONTIANAK, 26 FEBRUARI 2026

PENANGGUNG JAWAB UAKPB
Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak



YUNIAR NELLY, S.T., M.M.
NIP. 197106242006042001

LAPORAN BARANG HIBAH DK/TP

POSISI PER 31 DESEMBER 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

**DAFTAR BMN HIBAH DK/TP YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
KODE UAKPB : 099239

TANGGAL : 26-02-2026
Kode LAP : daftar_bmn_dhdktp_poc
HALAMAN: 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

PONTIANAK, 26 FEBRUARI 2026
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak



YUNIAR NELLY, S.T., M.M.
NIP. 197706242006042001

**LAPORAN PENYUSUTAN
BMN INTRAKOMPTABEL
POSISI PER 31 DESEMBER 2025**



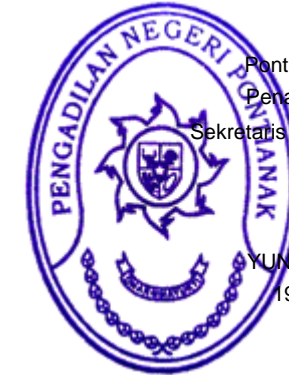
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099239 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 10/02/26 6:35 AM
Tgl Cetak : 10/02/26 2:38 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8



Pontianak, 10 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak

YUNIAR NELLY, S.T., M.M.
197706242006042001

LAPORAN PENYUSUTAN BMN EKSTRAKOMPTABEL

POSISI PER 31 DESEMBER 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099239 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 10/02/26 6:35 AM
Tgl Cetak : 10/02/26 2:39 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED					
KODE	URAIAN		Kuantitas	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8

Pontianak, 10 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak



YUNIAR NELLY, S.T., M.M.
197706242006042001

LAPORAN AMORTISASI BMN ASET TAK BERWUJUD

POSISI PER 31 DESEMBER 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

**LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

Tgl Data : 26/02/26 12:51 AM
 Tanggal : 26/02/26 8:46 AM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_amor_kel_satker_

UAPA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099239 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	MUTASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8

Pontianak, 26 Februari 2026
 Penanggung Jawab UAKPB
 Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak



YUNIAR NELLY, S.T., M.M.
 197706242006042001



LAPORAN PNBP

PER 31 DESEMBER 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 03 Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : 1300 KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : 099239 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 26/02/26 9:07 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	80,000	0	80,000	0
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	1,530,000	0	1,530,000	0
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	46,470,000	40,980,000	0	40,980,000	88.19
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	93,556,000	93,187,500	0	93,187,500	99.61
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	140,026,000	135,777,500	0	135,777,500	96.97
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	140,026,000	135,777,500	0	135,777,500	96.97
	JUMLAH PENDAPATAN	140,026,000	135,777,500	0	135,777,500	96.97

RESUME ASURANSI BMN

TAHUN ANGGARAN 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**

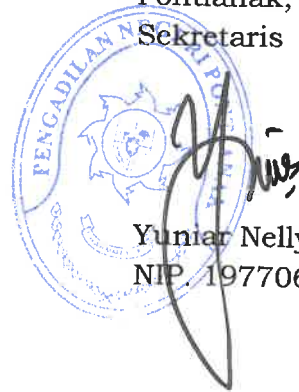
Jln. Sultan Abdurrahman No. 89 Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak 78116
Telp. (0561) 734100 www.pn-pontianak.go.id, pengadilannegeriptk@gmail.com

**RESUME PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**

1. Laporan Asuransi BMN 2025
Tidak terdapat Asuransi Barang Milik Negara (ABMN) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pontianak pada tahun 2025.
(rincian sebagaimana terlampir dalam tabel A)
2. Klaim Asuransi BMN 2025
Tidak terdapat klaim asuransi BMN yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Pontianak.
(rincian sebagaimana terlampir dalam tabel B)
3. Rencana Pengasuransian BMN pada 2026
Tidak terdapat rencana pengasuransian BMN pada 2026 yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Pontianak untuk DIPA 03.
(rincian sebagaimana terlampir dalam tabel C)

Pontianak, 26 Februari 2026

Sekretaris



Yuniar Nelly, S.T., M.M.
NIP. 197706242006042001

Tabel A. Laporan Asuransi BMN 2025

DAFTAR LAPORAN PENGASURANSIAN BMN

Tabel A

No	Kode Satuan Kerja				Kode Barang	Nama Barang	NUP	Lokasi							Risiko Diasuransikan	Jangka Waktu		Penanggung Risiko	Nilai Pertanggungan	Besaran Premi	Riwayat Klaim	Nomor Polis	Keterangan
	Kode Pengguna Barang	Kode Unit Eselon I	Kode Wilayah	Kode UAKPB				Jalan	RT/R W	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kotamadya	Propinsi	Kode Pos		TMT Mulai	TMT Berakhir						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL



Pontianak, 26 Februari 2026
 Sekretaris

Yuniar Nelly, S.T., M.M.
 NIP. 197706242006042001

Tabel B. Laporan Klaim Asuransi BMN 2025

LAPORAN KLAIM PENGASURANSIAN BMN

Tabel B

No	Kode Satuan Kerja				Kode Barang	Nama Barang	NUP	Lokasi							Tanggal Kejadian	Jenis Kejadian	Tanggal Pengajuan Klaim	Status	Besaran Klaim yang Disepakati	Dokumen Pembayaran		Keterangan
	Kode Pengguna Barang	Kode Unit Eselon I	Kode Wilayah	Kode UAKPB				Jalan	RT/RW	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	Propinsi	Kode Pos						Tanggal Penyetoran	No. Bukti Penyetoran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL




Pontianak, 26 Februari 2026
Sekretaris

Yulia Nelly, S.T., M.M.
NIP. 197706242006042001

DAFTAR USULAN RENCANA PENGASURANSIAN BMN
TA. 2026

Tabel C

No.	Kode Satuan Kerja				Kode Barang	Nama Barang	NUP	Lokasi							Tahun Pembangunan	Nilai Perolehan	Risiko	Penggunaan dan Fungsi BMN	Jangka Waktu		Besaran Premi	Pertimbangan	Keterangan
	Kode Pengguna Barang	Kode Unit Eselon I	Kode Wilayah	Kode UAK/PB				Jalan	RT/RW	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	Propinsi	Kode Pos					TMT Mulai	TMT Berakhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL



 Padang, 26 Februari 2026
 Setra
 Yuliarully, S.T., M.M.
 NIP. 19706242006042001

**REKAPITULASI KONSTRUKSI
DALAM Pengerjaan
PER 31 DESEMBER 2025**



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2025 (Unaudited)

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	Nomor KDP	Saldo Awal KDP	Nomor Kontrak	Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Akhir Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai KDP (Rp)	% Penyelesaian	Sumber Dana (Rp Murni/Pinjaman)	Uang Muka	Retensi	Keterangan *)			Catatan
															Dilanjutkan	Dihentikan Sementara	Dihentikan Permanen	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)
NIHIL																		
Total KDP																		

**LAPORAN BMN BERUPA
RUMAH NEGARA
PER 31 DESEMBER 2025**



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

**LAPORAN BMN BERUPA RUMAH NEGARA TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**

No.	1. Data Unit Kerja					2. Data Bangunan Rumah Negara					3. Data Realasi Tanah					4. Status Penguasaan Rumah Negara	5. Status Penghunan Rumah Negara					6. Data Lokal Rumah Negara				7. Koordinat Objek (GPS)		8. Keterangan
	Kode BA	Nama Kementerian / Lembaga	Kode Eselon I	Nama Eselon I	Kode UAKPS	Nama UAKPS	Kode Barang	NiUP	Nama Barang	Kondisi	Pemilik Tanah	Kode Barang	RUP	Nama Barang	Serupikat		Nomor Dokumen Sertifikat Tanah	Subyek yang Menghuni	Nomor Surat Izin Penghunan (SIP)	Sesuai atau Tidak Sesuai Penghunan Rumah Negara	Nama dan Nomor Jalan	RT / RW	Kelurahan / Desa	Kecamatan	Kota / Kabupaten	Provinsi	Latitude	
NIHIL																												

**NERACA PERCOBAAN
BERBASIS AKRUAL
PER 31 DESEMBER 2025**



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (099239) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 26/02/26 2:09 AM
Tgl Cetak : 26/02/26 9:08 AM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	71,329,650	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	436,625,989
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	135,777,500	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	12,125,560
0.0	391111	Ekuitas	0	135,928,046
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	80,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	1,530,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	40,980,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	93,187,500
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	43,444,300	0
3.0	521211	Beban Bahan	137,686,689	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	44,000,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,950,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	283,268,956	0
JUMLAH			720,457,095	720,457,095

Keterangan :

FINAL

Pontianak, 26 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Sekretaris

YUNIAR NELLY, ST,MM
NIP 197706242006042001

NERACA FACE
PER 31 DESEMBER 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (099239) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 26/02/26 2:09 AM
Tgl Cetak : 26/02/26 9:09 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	71,329,650	135,928,046	(64,598,396)	(47.52)
JUMLAH ASET LANCAR	71,329,650	135,928,046	(64,598,396)	(47.52)
JUMLAH ASET	71,329,650	135,928,046	(64,598,396)	(47.52)

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	71,329,650	135,928,046	(64,598,396)	(47.52)
JUMLAH EKUITAS	71,329,650	135,928,046	(64,598,396)	(47.52)
JUMLAH EKUITAS	71,329,650	135,928,046	(64,598,396)	(47.52)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	71,329,650	135,928,046	(64,598,396)	(47.52)

Keterangan :
FINAL

Pontianak, 26 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris

YUNIAR NELLY, ST,MM

NIP 19706142006042001



**MONITORING
TRANSFER KELUAR DAN
TRANSFER MASUK
PER 31 DESEMBER 2025**



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK



MONITORING TRANSFER KELUAR/MASUK SAMPAI DENGAN PERIODE BULAN 13

satker : 099239

No	BAES1	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih
1	00503	400252	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	117111	Barang Konsumsi	12,125,560	00503	099239	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	12,125,560	0

LAPORAN ASET SENGGKETA

PER 31 DESEMBER 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

**DATA LAPORAN ASET SENGKETA
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (UNAUDITED)**

No	Kode Satker	Wilayah	Nama Satker	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Jlh Bidang Tanah	Luas	Nilai Perolehan	Jenis Dokumen Kepemilikan Tanah	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Status Penggunaan	Substansi Permasalahan	Bersengketa/Bermasalah	Keterangan	Status	Data Dukung	Keterangan
NIHIL																				

PONTIANAK, 26 FEBRUARI 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG



YUNI NELLY, S.T., M.M.
NIP. 197706242006042001



**REKAPITULASI DAN RINCIAN
TRANSAKSI HIBAH MASUK BMN
BERUPA ASET TETAP
PER 31 DESEMBER 2025**



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
RINCIAN TRANSAKSI HIBAH MASUK BMN BERUPA ASET TETAP
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 (Unaudited)

No	Kode Satker	Nama satker	Jenis Transaksi	Kode Barang	Nama Barang	Kuantitas	Nilai	Bulan Transaksi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
NIHIL									

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
RINCIAN TRANSAKSI HIBAH KELUAR BMN BERUPA ASET TETAP
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 (Unaudited)

No	Kode Satker	Nama satker	Jenis Transaksi	Kode Barang	Nama Barang	Kuantitas	Nilai	Bulan Transaksi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
NIHIL									

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
RINCIAN TRANSAKSI HIBAH MASUK DAN HIBAH KELUAR BMN BERUPA PERSEDIAAN
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 (Unaudited)

No	Kode Satker	Nama satker	Jenis Transaksi	Kode Barang	Nama Barang	Kuantitas	Nilai	Bulan Transaksi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NIHIL									